

# KEBIJAKAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Mahara Sintong

Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan  
Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate Medan, 20211 Indonesia  
email : [hara.tampubolon@yahoo.com](mailto:hara.tampubolon@yahoo.com)

## Abstrak

Di era modernisasi, masalah kependudukan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari seluruh institusi negara, melalui kebijakan berwawasan kependudukan berbasis *human welfare* yang dapat memberikan kontribusi dalam meminimalisir masalah kependudukan bagi keberhasilan pembangunan. Untuk itu, dalam konteks kebijakan berwawasan pembangunan, penduduk tidak hanya ditempatkan sebagai obyek tetapi juga sekaligus sebagai subyek dari pembangunan. Kebijakan berwawasan kependudukan harus segera terumuskan dan menjadi arahan pembangunan yang dalam implementasinya, perlu diterapkan secara komprehensif dan sinergis dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan memiliki daya saing global. Sinergisitas kebijakan berwawasan kependudukan dengan kualitas sumber daya manusia, mensyaratkan perlunya pendidikan berkualitas sebagai wahana sistemik dalam menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki *life skill*, *personal skill* yang mencakup *self awareness* dan *thinking skill*, serta *social skill*, *academic skill*, maupun *vocational skill*.

*Kata kunci: kebijakan berwawasan kependudukan, sumber daya manusia.*

## PENDAHULUAN

Masalah kependudukan bukan lagi hanya merupakan masalah lokal maupun regional melainkan sudah menjadi masalah internasional. Di abad modernisasi dan globalisasi, kependudukan telah disadari sebagai salah satu masalah besar di planet bumi. David L. Sill (Sumaatmadja, 2008: 226) mengemukakan lima masalah besar di dunia dewasa ini yakni; (1) *peace* atau perdamaian, (2) *prejudice* atau purbasangka, (3) *population* atau penduduk, (4) *poverty* atau papamiskin, dan (5) *pollution* atau pencemaran. Dari lima masalah besar yang dikemukakan tersebut, masalah penduduk merupakan salah satu diantaranya. Begitupun dengan Meadows (1972: 29), yang mengkaji

masalah kependudukan yakni kecenderungan pertumbuhan penduduk yang cepat dengan mengkaitkannya pada pertumbuhan industrialisasi, pertumbuhan produksi pangan, dan pertumbuhan konsumsi. Pertumbuhan variabel-variabel tadi jika tidak diubah dan dikendalikan akan menghasilkan pertumbuhan pencemaran yang mempengaruhi batas pertumbuhan dunia. Secara keseluruhan masalah ini akan mengancam kapasitas pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan mengancam kelestarian kehidupan penduduk di planet bumi. Bahkan lebih luas lagi Brown et.al (1976), telah mengidentifikasi 22 dimensi permasalahan kependudukan yang semuanya menekankan dan bertalian

dengan pertumbuhan penduduk dunia yang cepat dan tanpa henti, yakni: pencemaran lingkungan, perubahan iklim, pengrusakan hutan, urbanisasi, penurunan pendapatan, inflasi, pengangguran, perumahan, tingkat melek huruf, kelaparan, kekurangan air bersih, keterbatasan pelayanan kesehatan, krisis energi dan sumberdaya alam, serta konflik politik.

Tiga paparan pakar di atas, cukup memberi faktualitas pentingnya isu kependudukan di tingkat global. Sekaligus menggambarkan pentingnya masalah kependudukan untuk mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari seluruh institusi negara, melalui kebijakan kependudukan berbasis *human welfare* yang dapat memberikan kontribusi dalam meminimalisir masalah kependudukan bagi keberhasilan pembangunan. Tak dapat disangkal, faktor kependudukan merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya dalam konteks kebijakan pembangunan, penduduk tidak hanya ditempatkan sebagai obyek tetapi juga sekaligus sebagai subyek dari pembangunan. Paradigma ini menunjukkan, pembangunan yang mengandung makna sebagai perubahan sosial yang direncanakan, terarah, dan dilakukan secara sadar bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan manusia itu sendiri. Dengan demikian, pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (*people-centered*), yaitu berdasarkan situasi penduduk. Sudah saatnya pembangunan kependudukan dijadikan sebagai program prioritas pada institusi negara, demi pembangunan yang membawa kepada *human welfare*. Pandangan ini sekaligus menunjukkan, perlunya kebijakan berwawasan kependudukan yang

dapat mengkomodir masalah-masalah kependudukan melalui peningkatan sumber daya manusia.

## PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN BERMUTU ABAD 21

Sungguh ironis, disaat perkembangan global yang menuntut adanya peningkatan sumber daya manusia, Indonesia justru menunjukkan sebagai negara yang masih rendah mutu sumber daya manusianya. Menurut *Survey* UNDP tahun 2004 disebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia berada pada peringkat ke-109 dari 174 negara di dunia. Sementara itu, Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand masing-masing berada pada peringkat ke-41 sampai 44. Posisi negara kita bahkan di bawah Vietnam yang baru bangkit karena tekanan tentara Amerika Serikat. Di Asia, Indonesia hanya menempati posisi ke-45 dari 48 negara-negara Asia. Daya saing ekonomi berada pada peringkat ke-41, serta penguasaan iptek menempati posisi ke-40. Data tersebut sedikit berubah, pada tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia justru melorot berada pada peringkat 121 dari 187 negara.

Di sisi lain, jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (*open unemployment*). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta. Pembangunan yang selama ini dibanggakan memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, ternyata hanya berasal dari pemanfaatan sumber daya alam intensif (hutan, dan hasil tambang),

dan arus modal asing yang berupa pinjaman dan investasi langsung. Artinya pembangunan yang selama ini berlangsung, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi, namun hanya mengandalkan sumber daya alam.

Data-data dari hasil survei UNDP di atas cukup mengejutkan, sekaligus memunculkan pertanyaan; ada apa sebenarnya dengan SDM Indonesia dan bagaimana kontribusi pendidikan selama ini terhadap peningkatan sumber daya manusia? Namun demikian, hasil tersebut tidak cukup hanya diselesaikan dengan bertanya. Sudah saatnya bangsa ini bangkit dalam membangun sumber daya manusianya secara bermutu. Untuk menghadapi kondisi sumber daya manusia yang masih rendah tersebut, perlu dikembangkan insan Indonesia yang melek dan sadar IPTEK, mau dan mampu bekerja keras, serta mampu berpikir kritis-analisis-integratif-konsepsional. Di era global, bangsa ini membutuhkan manusia modern yang cerdas, logis, sistematis dan komunikatif dalam masyarakat yang serba kompleks dan sarat dengan persaingan, mampu bersaing namun tetap berorientasi pada mutu. Karena itu pendidikan yang dibutuhkan bukan hanya sekedar *transfer of knowledge* tetapi pendidikan yang *achievement oriented*, yaitu pendidikan yang didasarkan pada usaha pemenuhan kebutuhan pelanggan, berorientasi pada proses, dan mengutamakan mutu. Uraian ini mengindikasikan bahwa globalisasi sebagai rekayasa ekonomi dunia, telah menjadikan "mutu" sebagai kata kunci. Standar mutu menjadi *reference* standar bagi manusia dalam mengukur kinerjanya, termasuk standar mutu pendidikan sebagai

tuntutan dalam menghadapi persaingan global.

Dalam suatu kehidupan global, batas-batas negara secara fisik-geografik menjadi tidak penting lagi. Justru faktor yang paling penting bagi eksistensi suatu bangsa adalah dikuasainya teknologi informasi. Dengan adanya berbagai penemuan dalam bidang teknologi informasi, kekuasaan suatu negara dalam arti teritorial menjadi semakin kabur. Hal ini membawa implikasi bahwa pendidikan nasional kita harus mampu mempersiapkan bangsa ini menjadi komunitas yang terberdayakan dalam menghadapi kehidupan global yang semakin lama semakin menggantungkan diri pada teknologi informasi. Kondisi ini pada akhirnya juga berakibat pada sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengutamakan pada pola kehidupan atas dasar prinsip interdependensi (Besar, 1993). Agar bangsa ini memiliki peran yang signifikan dalam konteks interdependensi kehidupan, baik yang terjadi dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global, sistem pendidikan harus mampu memberdayakan masyarakat secara luas. Salah satu ciri masyarakat yang terberdayakan oleh sistem pendidikan ialah dimilikinya keunggulan kompetitif dalam konteks global. Keunggulan yang dimaksud bukan hanya keunggulan intelektual, tetapi juga meliputi aspek-aspek lainnya yang menunjukkan sebagai sumber daya manusia yang handal (Hasan, 1996).

Keunggulan kompetitif itu sendiri oleh penulis diartikan sebagai label/ tanda yang di dalamnya mengindikasikan adanya seperangkat nilai (*values*) yang berorientasi pada mutu, bersifat futuristik, dan adanya

proses pemberdayaan. Dengan demikian, berbicara mengenai keunggulan kompetitif dalam pendidikan, berarti dengan sendirinya mengindikasikan adanya proses pendidikan bermutu. Apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan bermutu? Nampaknya bangsa ini, harus segera merancang pendidikan bermutu tersebut, seiring dengan derasnya era global yang menuntut hadirnya sumber daya manusia yang unggul.

Kehadiran pendidikan bermutu abad XXI, sudah seyogianya dijadikan sebagai program dalam kebijakan pembangunan pendidikan, sekaligus dijadikan sebagai strategi dalam mengantisipasi tantangan global. Beberapa tantangan global yang perlu untuk diantisipasi oleh dunia pendidikan, dikemukakan oleh Suyanto (2000) yang antara lain:

*Pertama*, proses investasi dan re-investasi yang terjadi di dunia industri berlangsung sangat cepat, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat pula pada organisasi kerja, struktur pekerjaan, struktur jabatan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Sebaliknya, praktek pendidikan tradisional berubah sangat lambat, akibatnya *mismatch education and employment* cenderung semakin membesar. *Kedua*, perkembangan industri, komunikasi dan informasi yang semakin cepat akan melahirkan "knowledge worker" yang semakin besar jumlahnya. *Knowledge worker* ini adalah pekerjaan yang berkaitan erat dengan *information processing*. *Ketiga*, berkaitan dengan dua kecenderungan pertama, maka muncul kecenderungan bahwa pendidikan bergeser dari ide *back to basic* ke arah ide *the forward to future basics*, yang mengandalkan pada peningkatan kemampuan TLC (*how to think, how to learn and how to create*).

*How to think* menekankan pada pengembangan *critical thinking, how to learn* menekankan pada kemampuan untuk bisa secara terus menerus dan mandiri menguasai dan mengolah informasi, dan *how to create* menekankan pada pengembangan kemampuan untuk dapat memecahkan berbagai problem yang berbeda-beda.

*Keempat*, berkembang dan meluasnya ide demokratisasi yang bersifat substansi, yang antara lain dalam dunia pendidikan akan terwujud dalam munculnya tuntutan pelaksanaan *school based management* dan *site-specific solution*. Seiring dengan itu, karena kreatifitas guru, maka akan bermunculan berbagai bentuk praktek pendidikan yang berbeda satu dengan yang lain, yang kesemuanya untuk menuju pendidikan yang produktif, efisien, relevan dan berkualitas. *Kelima*, semua bangsa akan menghadapi krisis demi krisis yang tidak hanya dapat dianalisis dengan metode sebab-akibat yang sederhana, tetapi memerlukan analisis sistem yang saling berkaitan.

Tantangan-tantangan tersebut di atas, menuntut kualitas sumber daya manusia yang berbeda dengan kualitas yang ada dewasa ini. Muncul pertanyaan mampukah praktek pendidikan kita menghasilkan lulusan dengan kualitas yang memadai untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas? Yang kemudian menjadi permasalahan adalah bagaimana mempersiapkan agar dunia pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi, berkompetisi, dan memiliki kecakapan hidup (*life skill*) sehingga mampu membuka usaha sendiri untuk menghadapi kompetisi global.

Untuk menghadapi tantangan global, maka pendidikan harus melakukan pembenahan agar mampu

mengikuti kemajuan dan perkembangan transformasi yang semakin canggih. Khusus dalam bidang pendidikan untuk melakukan perubahan melalui inovasi dunia pendidikan, perlu melakukan reformasi dalam dunia pendidikan dan pendidikan kewirausahaan.

Perubahan yang telah, sedang dan akan terjadi di segala aspek kehidupan manusia telah mendorong setiap pihak untuk segera merespon sesuai dengan kondisi, kemampuan dan tujuan masing-masing. Khusus dalam dunia pendidikan, terlihat beberapa kecenderungan umum sebagai respon terhadap perubahan tersebut, yaitu (1) pilihan untuk memperoleh jenis pendidikan dan pelatihan semakin banyak, yang antara lain tercermin dan sistem informasi yang makin beraneka ragam, peran pendidikan formal dan informal yang makin meningkat, masa pendidikan yang makin setingkat, komputer based yang makin meluas, serta (2) orientasi pendidikan dan latihan akan lebih berorientasi kepada kebutuhan dunia kerja dan peningkatan kemampuan profesional setiap orang, yang tergambar dan peran kelompok profesional dan masyarakat akan makin meningkat, sehingga makin mendorong berkembangnya sistem dan metode pendidikan dan pelatihan berdasarkan kompetensi.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tengah-tengah persaingan kompetitif, maka Indonesia mutlak harus mampu mengikuti dan harus bisa memenangkan persaingan tersebut. Untuk itu, Indonesia harus lebih terbuka terhadap perubahan internal dan eksternal yang positif, seperti dalam bidang ekonomi dan informasi, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada masa yang akan datang, setiap individu baik sebagai warga negara maupun sebagai warga negara global, akan dituntut untuk memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu global seperti; masalah lingkungan, makin meningkatnya kesadaran dan pentaatan kepada hukum *rule of law*, makin meluasnya kesadaran azas keadilan dan gerakan perlindungan hak azasi manusia dan makin kuatnya gerakan dan perwujudan cita-cita terbentuknya *civil-society*. Oleh karena itu, dituntut sumber daya manusia yang makin berkualitas, terutama yang dicapai melalui pendidikan dan latihan yang mampu mengakomodasikan setiap perubahan yang terjadi. Dalam rangka itulah, perlu dilakukan reformasi pendidikan. Dengan adanya reformasi pendidikan tersebut, maka diperlukan *educated and civited human being*, yaitu menciptakan masyarakat madani, masyarakat yang cerdas dan bermoral, dapat berdiri sendiri dan bekerjasama dengan orang lain untuk menciptakan masyarakat sejahtera.

Reformasi pendidikan yang dilakukan dapat meliputi: (1) reformasi pendidikan keluarga dan pola asuh keluarga adalah merupakan bagian kehidupan dalam masyarakat yang pertama dan utama bagi seorang anak. Pola asuh yang diberikan terutama penanaman nilai-nilai moral yang membentuk anak menjadi anak yang saleh, hormat dan memiliki pengetahuan, kreatif dan memiliki kemandirian, memiliki rasa percaya atas kemampuan yang dimiliki dan bertanggungjawab (Manulang, 2006). Melalui pendidikan keluarga ini diharapkan anak akan memiliki visi untuk melakukan yang baik yang menunjang pada kehidupannya kelak; (2) reformasi tujuan, program dan *budget* pendidikan. Pendidikan

merupakan kunci untuk mencapai keadilan sosial. Dana investasi yang baik untuk kemakmuran ekonomis, baik untuk bangsa sebagai keseluruhan maupun untuk setiap anggotanya. Oleh karena itu, dunia pendidikan masa depan harus mampu membuktikan bahwa pendidikan mutlak diperlukan untuk pembangunan dalam arti luas bahkan pendidikan merupakan persoalan mati hidup suatu bangsa. Anggaran dana pendidikan harus mendapat prioritas. Selain itu, dalam manajemen pola baru pengelolaan pendidikan diharapkan dapat melibatkan dan memberdayakan kemampuan masyarakat. Salah satu tujuan UU No.20 Tahun 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang kebutuhan pendidikan adalah melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pendidikan termasuk pengambilan keputusan tentang berbagai kebijaksanaan dalam dunia pendidikan. Melalui otonomi daerah, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan akan semakin erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu juga diperlukan reformasi terhadap sarana pendidikan dan pembelajaran. Sarana pendidikan dan pembelajaran merupakan suatu yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Setiap sekolah maupun perguruan tinggi harus berupaya keras untuk melayani tuntutan masyarakat sebagai pemakai

jasa pendidikan. Untuk itu, perlu dipertanyakan apakah sekolah atau perguruan tinggi tersebut masih mempunyai daya tarik, daya saing dan daya tahan. Bila hal ini masih diminati masyarakat maka pemberdayaan sekolah dan perguruan tinggi harus dilaksanakan secara optimal dengan meningkatkan mutu atau kualitas baik dalam bidang sarana pembelajaran, bidang pelayanan, memiliki sumber-sumber belajar yang memadai seperti sarana dan prasarana yang mendukung terhadap proses belajar mengajar. Untuk itu, komponen-komponen pelaku pendidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, finansial, kurikulum dan sistem informasi, harus difungsikan secara optimal dalam arti direncanakan diorganisir, digerakkan, dikendalikan dan dikontrol dengan baik.

Reformasi juga dilakukan terhadap proses pendidikan, baik pendekatan belajar (*learning approach*) maupun pendekatan pembelajarannya (*instruction method*) dan materi pelajarannya. Kualitas pendidikan dapat ditinjau dan segi proses dan produk (Manulang, 2006). Pendidikan disebut berkualitas dari segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas dari segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut: (1) Peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (*learning task*) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasus belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal); (2) Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya

mengetahui sesuatu, tetapi hanya melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (*learning and learning*); (3) Hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja.

Pendidikan yang diminati masyarakat pada masa yang akan datang adalah pendidikan yang selain proses pembelajarannya bermutu, juga ditunjukkan dengan hasil yang bermutu. Dalam pembelajaran yang bermutu, guru maupun dosen diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan bidang pembelajaran secara optimal sehingga potensi-potensi peserta didik dapat berkembang. Dellors (1996) mengemukakan, bahwa pendidikan bermutu abad XXI selayaknya menggunakan model pembelajaran yang mengacu pada: *Learning to know*, *Learning to do*, *Learning to live together* dan *Learning to be*.

Model pembelajaran di atas, melengkapi dunia pendidikan dengan membekali peserta didiknya mengenai kecakapan hidup (*life skill*), yaitu kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Untuk itu, dunia pendidikan harus mampu mensinergikan berbagai mata pelajaran/mata kuliah menjadi kecakapan hidup yang diperlukan seseorang, di manapun kita berada, bekerja atau tidak bekerja. Kecakapan hidup disini dapat dibedakan atas kecakapan personal (*personal skill*) mencakup kecakapan mengenal diri (*self awareness*) dan kecakapan berfikir rasional (*thinking skill*). Kecakapan sosial (*social skill*), kecakapan akademik (*academic skill*) dan kecakapan vokasional (*vocational skill*). Dengan

bekal kecakapan hidup ini diharapkan para lulusan dunia pendidikan akan mampu memecahkan problem kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari dan menciptakan pekerjaan bagi yang tidak melanjutkan pendidikannya. Menurut Bently, untuk mewujudkan hal itu, perlu diterapkan prinsip pendidikan berbasis luas yang tidak hanya berorientasi pada bidang akademik atau vokasional semata, tetapi juga diberikan bekal *learning how to learn* sekaligus *learning how to unlearn*, tidak hanya belajar teori, tetapi mampu mempraktekkan dan memecahkan problem kehidupan sehari-hari (Manulang, 2006).

Kemajuan teknologi yang begitu pesat tanpa diantisipasi oleh dunia pendidikan akan berdampak terjadinya perubahan yang tidak dapat dikendalikan. Untuk itu, dunia pendidikan harus melakukan terobosan dengan pemberian pendidikan yang mampu membekali peserta didik dengan perkembangan jaman, karena dunia pendidikan merupakan lembaga yang berpotensi untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Salah satu pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan kewirausahaan. Program kewirausahaan ini dapat berfungsi sebagai aktivitas yang pada saatnya nanti dapat mewujudkan *Income Generating Unit* yang mutlak diperlukan dalam rangka pemberlakuan Otonomi Pendidikan. Pendidikan kewirausahaan merupakan kebutuhan yang harus diberikan dalam dunia pendidikan baik dalam Pendidikan Menengah dan Kejuruan maupun Pendidikan Tinggi dengan memasukkan sebagai mata pelajaran/mata kuliah pada kurikulum. Pendidikan

Kewirausahaan akan menambah wawasan dan menempa jiwa untuk mampu mandiri di atas kemampuan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan merupakan “pintu gerbang” dalam membentuk dan menumbuhkan pribadi-pribadi yang ulet dan tangguh serta berkualitas dan mampu memberdayakan potensi-potensi yang dimilikinya dalam menciptakan inovasi baru sehingga menghasilkan nilai tambah bagi kehidupan, keluarga, masyarakat maupun negara. Kesiapan dalam menghadapi era globalisasi, maka budaya kewirausahaan harus terwujud sebagai sublimasi ilmu pengetahuan dan teknologi, paling tidak pada sebagian besar lulusan pendidikan.

Untuk menciptakan unggulan kompetitif, kita memerlukan inovasi yang pesat dalam dunia pendidikan. Menjadi bangsa yang berharkat memerlukan unggulan kompetitif dalam berbagai bidang. Bukan jamannya lagi kita mengandalkan murahnya tenaga kerja untuk mendukung dan membenarkan konsep unggulan kompetitif. Jika kita ingin menghasilkan berbagai unggulan kompetitif *outcome* pendidikan, inovasi harus menjadi prioritas penting dalam pengembangan sektor pendidikan (Suyanto, 2001). Tanpa adanya inovasi yang signifikan, pendidikan kita hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mandiri, selalu tergantung pada pihak lain. Dalam perspektif global, hasil pendidikan yang demikian itu justru akan menjadi beban bagi bangsa dan negara republik ini. Dengan demikian, pendidikan harus digunakan sebagai inovasi nasional bagi pencapaian dan peningkatan kualitas *outcome* secara berkelanjutan dan tersistem agar

unggulan kompetitif selalu dapat dipertahankan.

Strategi pembangunan nasional pada masa Orde Baru yang terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak memiliki kekokohan dalam menghadapi krisis secara global maupun regional. Hal ini terjadi antara lain karena kurang adanya kebijakan pendidikan yang mengacu pada penyediaan kualitas sumber daya manusia yang memiliki unggulan kompetitif dalam skala global. Oleh karena itu, dalam membangun paradigma baru sistem pendidikan di era global abad 21, sektor pendidikan perlu difungsikan sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya bangsa agar kita memiliki unggulan kompetitif dalam berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin global dan semakin banyak hal yang dapat dilakukan hanya secara *virtual*. Indonesia harus siap menghadapi globalisasi ketiga, yaitu globalisasi budaya (Nafi, 2004).

Modal dasar bagi terbentuknya unggulan komparatif dan unggulan kompetitif ialah dimilikinya konsep diri dan kesadaran diri yang diperoleh peserta didik selama dalam proses belajar. Konsekuensinya, inovasi dalam wacana pembelajaran menuntut agar semua institusi pendidikan kita mampu menanamkan kemampuan tentang bagaimana belajar untuk belajar, bukan belajar untuk menghafal dan belajar untuk tergantung kepada pihak lain. Dengan model pembelajaran seperti itu kreativitas dan tanggung jawab peserta didik akan muncul, dan oleh karenanya unggulan komparatif dan unggulan kompetitif akan dapat dibudayakan sebagai upaya menghadapi tantangan global.

Langkah utama untuk membangun paradigma baru sistem pendidikan nasional abad 21 adalah bahwa Pendidikan Nasional hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokratisasi bangsa sehingga memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan seluruh komponen masyarakat secara demokratis, baik sebagai individu & anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara dalam konteks kehidupan yang global (UNESCO dan APNIEVE, 2000).

Untuk itu reformasi terhadap proses pendidikan dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap pendekatan belajarnya (*learning approach*) maupun terhadap pendekatan pembelajaran (*instruction method*) dan materi pembelajarannya, dengan menggunakan model pembelajaran yang mengacu pada pilar: *Learning to know*, *Learning to do*, *Learning to live together* dan *Learning to be*. Melalui model ini, peserta didik akan dibekali dengan berbagai kecakapan, seperti: *life skill*, *personal skill* yang mencakup *self awareness* dan *thinking skill*. Kecakapan berikutnya adalah *social skill*, *academic skill*, *vocational skill*. Dengan bekal kecakapan hidup ini diharapkan para lulusan dunia pendidikan akan mampu memecahkan problem kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

#### **PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA GLOBAL**

Suatu masyarakat belajar harus mampu melakukan pembaharuan pendidikan. Ada dua aspek yang harus ditekankan di dalam proses pendidikan berkonteks global, yaitu: (1) pengembangan "masyarakat informasi", adalah pengembangan

kesempatan untuk mengakses data dan fakta. Dengan demikian pendidikan harus dapat memberikan akses bagi setiap orang untuk dapat memilih, menyusun, mengolah, dan menggunakan informasi, (2) pendidikan harus mampu mengadaptasi perubahan masyarakat secara berkesinambungan, melalui peningkatan kualitas pendidikan (UNESCO, 1996).

Apa yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa globalisasi telah membawa dampak yang cukup luas terhadap semua dimensi kehidupan manusia. Dampak tersebut adalah berupa perubahan-perubahan yang begitu cepat pada semua bidang, termasuk juga pada bidang pendidikan. Proses globalisasi yang terjadi telah menciptakan hubungan saling ketergantungan (*interdependensi*), namun pada sisi lain membawa dampak adanya persaingan secara bebas (*kompetitif*). Kondisi ini merupakan suatu tantangan di bidang pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu bersaing di era global. Dengan demikian realisasi globalisasi telah membawa implikasi pada pengembangan sumber daya manusia (*human resource*), dimana salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi, sedangkan daya saing ekonomi akan terwujud jika didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM yang handal, maka dibutuhkan pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan dalam konteks global, tidak hanya sekedar mempersiapkan anak didik untuk mampu hidup dalam masyarakat kini tetapi mereka juga harus disiapkan untuk hidup di masyarakat yang akan datang yang semakin lama semakin

sulit diprediksi karakteristiknya. Kesulitan memprediksi karakteristik masyarakat yang akan datang disebabkan oleh kenyataan bahwa di era global ini perkembangan masyarakat tidak linier lagi, perkembangan masyarakat penuh dengan dikontinuitas, jaman terus berubah, dan interdependensi semakin *intens*. Untuk itu dalam menghadapi dampak dan tuntutan globalisasi di bidang pendidikan, perlu membangun pendidikan yang berorientasi keluar (*outward looking*), yang menyiapkan peserta didik berwawasan luas, cerdas, berkepribadian dan memiliki kemampuan serta keterampilan (*life skill*) sebagai warga negara maupun sebagai warga dunia. Singkatnya, bahwa untuk menghadapi dampak dan tuntutan globalisasi, diperlukan upaya pemberdayaan manusia berkualitas.

Sekaitan dengan hal di atas, Tillar (1997) menjelaskan lima alasan perlunya pengembangan sumber daya manusia dalam era globalisasi: (1) Perubahan sosial-ekonomi kesejagatan karena berbagai kesepakatan APEC, AFTA, dan lain-lain mendorong semua negara harus bersiap-siap secara menyeluruh, terutama menyiapkan manusianya; (2) Negara tetangga seperti Malaysia telah menelurkan Malaysia's Vision 2020, Singapura mencanangkan The Next Lap, dan pasti negara ASEAN lainnya tidak mau ketinggalan; (3) Menuju tahun 2020, mungkin terpengaruh oleh pemikiran Toffler, Naisbitt, dan lain-lain, terjadilah perubahan gelombang politik dengan fokus/orientasi utama pada politik-ekonomi yang amat mendasar di berbagai negara. Di sini istilah negara macan ekonomi secara relatif dimaknai identik dengan "macan politik"; (4) Seluruh kegiatan pembangunan umumnya difokuskan

kepada peningkatan/ perbaikan taraf hidup manusia sesuai indikator dalam *Human Development Index* (HDI), yaitu pendidikan; (5) Semakin membahana tuntutan dilaksanakannya *civil society*.

Lima alasan di atas menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia di era globalisasi membutuhkan pendidikan bermutu bervisi global. Pendidikan bermutu bervisi global dibangun untuk mempersiapkan peserta didik di masa datang, yang tidak saja memiliki keunggulan di bidang kognitif dan psikomotor, tetapi juga memiliki kemampuan afektif (seperangkat nilai/*values*) alam menghadapi perubahan dunia yang begitu *intens*.

Dalam pendidikan bermutu bervisi global, peserta didik juga harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal dan harus tetap diajak berfikir tentang apa yang ada di sekitar lokalnya. Namun pada saat bersamaan pendidikan ini juga harus membuat peserta didik dapat berfikir secara global, yaitu dengan cara mengajak mereka untuk peduli akan situasi yang ada di dunia luar (*act locally think globally*).

Profil peserta didik yang diharapkan dari hasil pendidikan bervisi global adalah peserta didik yang memiliki *knowledgeable*, punya rasa ingin tahu (*inquirer*), berani mengambil resiko (*a risk-taker*), memiliki rasa peduli (*caring*), berprinsip, pemikir sejati (*thinker*), berfikiran terbuka (*open minded*), seimbang secara fisik-mental-rohani (*well-balanced*), mampu berkomunikasi (*communicator*), dan juga dapat berefleksi (*reflective*).

Untuk tercapainya *output* pendidikan bermutu bervisi global di atas, maka di dalam konteks pembelajaran, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan: (1)

Menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan hanya semata sebagai objek. Peserta didik ditempatkan pada tingkat yang paling atas (*students as the center of learning*); (2) Membangun kreativitas peserta didik, agar mereka dapat berperan aktif. Mereka diajak ke dalam setting pembelajaran yang terdesain untuk melihat kemampuan dan kompetensi secara individu, karena setiap siswa adalah berbeda (*Every child is unique*); (3) Menerapkan *activity-based learning*. Siswa aktif 'bekerja' untuk mendapatkan pengetahuan, menentukan konsep dan mengasah keterampilan, tanpa melupakan nilai-nilai perilaku/*attitudes*; (4) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah (*problem solver*), tanpa meninggalkan sisi-sisi nilai kemanusiaan, berpikiran terbuka dan berwawasan global (*open and international minded*); (5) Menerapkan *inquiry based learning*, melalui setting penelitian/riset sederhana. (Sumantri, 1996).

Berdasarkan uraian di atas, pendidikan bermutu bervisi global dirancang untuk menghasilkan peserta didik yang unggul. Ini berarti untuk menciptakan keunggulan kompetitif, memerlukan inovasi pembelajaran dalam dunia pendidikan.

Inovasi dalam sektor pendidikan, juga dibangun untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan jaman, termasuk kebutuhan akan teknologi informasi. Memperkenalkan dan membiasakan peserta didik terhadap dunia teknologi, akan memungkinkan peserta didik dapat: (1) Mengembangkan berpikir kritis terhadap teknologi; (2) Mengembangkan kemampuan berpendapat tentang teknologi dan mampu menggambarannya pada orang lain; (3) Mengidentifikasi

dampak teknologi baik yang positif maupun yang negatif terhadap masyarakat dan lingkungan; (4) Memiliki wawasan dalam memilih profesi dalam bidang teknologi sehingga memiliki peran yang berarti di dalam masyarakat, (4) Memiliki motivasi untuk belajar lebih lanjut tentang teknologi; (5) Membiasakan diri bekerja sendiri dalam kebersamaan. (Doornekamp, 1995).

Inovasi harus menjadi prioritas penting dalam pengembangan sektor pendidikan. Tanpa ada inovasi yang signifikan, pendidikan kita hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mandiri, selalu tergantung pada pihak lain. Dalam perspektif global, hasil pendidikan yang demikian itu justru akan menjadi beban bagi bangsa dan negara republik ini. Dengan demikian, pendidikan harus digunakan sebagai inovasi nasional bagi pencapaian dan peningkatan kualitas *outcome* secara berkelanjutan dan tersistem agar unggulan kompetitif selalu dapat dipertahankan.

Belajar dari pengalaman masa lalu, dimana strategi pembangunan nasional terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak memiliki kekokohan dalam menghadapi krisis secara global maupun regional. Hal ini terjadi antara lain karena kurang adanya kebijakan pendidikan yang mengacu pada penyediaan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dalam skala global. Oleh karena itu, dalam membangun paradigma baru, sistem pendidikan di era global abad 21, sektor pendidikan perlu difungsikan sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya bangsa agar kita memiliki keunggulan kompetitif dalam berbangsa dan bernegara di

tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin global.

## PEMBANGUNAN KUALITAS PENDUDUK SUMATERA UTARA

Untuk tercapainya *human welfare*, faktor kependudukan menjadi aspek penting dalam pembangunan. Studi kependudukan menjadi prioritas, bukan semata sebagai wahana dalam memecahkan masalah kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, namun juga sebagai kerangka kerja dalam mengumpulkan data dasar (*basic data*) kependudukan, menginterpretasikan, menganalisisnya sampai kepada menetapkan perspektif kependudukan ke depan bagi kehidupan ruang bangsanya.

Bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, kajian terhadap kependudukan sudah selayaknya dijadikan sebagai program utama dalam memberikan sumbangan berharga bagi perencanaan dan pembangunan nasional. Gambaran faktual mengenai dinamika kependudukan Indonesia ke depan pun perlu dikaji secara mendalam guna memprediksi tantangan pembangunan bangsa (Salim, 2013). Berdasarkan kajian dari beberapa pakar, dinamika kependudukan Indonesia ke depan menunjukkan: (1) Diperkirakan pada pertengahan kurun waktu 2020-2030, dinamika kependudukan di Indonesia mengarah ke fase *windows of opportunity*; (2) Fenomena bonus demografi pada tahun 2030-an (jumlah angkatan kerja dalam usia yg produktif sangat besar sekitar 69 % dari jumlah penduduk); (3) Memasuki tahap masyarakat yg produktif

4. Diprediksi pada tahun 2030-an akan menjadi negara ekonomi terbesar ke tujuh di dunia (Jalal, 2013; Effendi, 2013).

Prediksi fenomena di atas, bisa jadi merupakan harapan. Namun sebaliknya, bisa jadi musibah manakala komponen bangsa ini tidak dapat mengambil atau memanfaatkan kesempatan yang datangnya hanya sekali. Bonus demografi akan berubah menjadi bonus musibah, jika bangsa ini tidak dapat memenuhi prasyarat yang harus dipenuhi dalam mencapai bonus demografi. Prasyarat pemanfaatan bonus demografi, mengharuskan bangsa ini memiliki: (1) Kemampuan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk; (2) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Bangsa; (3) Pendidikan yang Berkualitas; (4) Peningkatan Layanan Kesehatan; (5) Penciptaan Lapangan Kerja yang Memadai.

Prasyarat di atas, terasa cukup berat. Untuk itu komponen bangsa ini harus mampu membenahi kondisi kependudukan. Namun sayang, kondisi kependudukan itu sendiri masih menggambarkan faktualitas sebagai berikut: (1) Pertumbuhan penduduk Indonesia yg masih cukup tinggi yaitu 1,49% pertahun; (2) Pertumbuhan pangan hanya 0,49%, (3) Dominasi lulusan SD sekitar 60%; (4) Angka kemiskinan sebesar 11,6% dari total penduduk Indonesia; (5) Angka pengangguran kerja 6,14% dari jumlah angkatan kerja sebesar 116,5 juta jiwa; dan (5) Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di rangking 121 dari 187 negara.

Faktualitas kondisi kependudukan nasional di atas, tidak jauh berbeda dengan kondisi kependudukan di Provinsi Sumatera Utara. Secara umum, profil kependudukan di Sumatera Utara menggambarkan fenomena: (1) Jumlah penduduk yang besar; (2) Pertumbuhan penduduk yang cepat. (3) Persebaran penduduk tidak merata;

- (4) Kualitas penduduk yang rendah;
- (5) Komposisi penduduk sebagian besar berusia muda.

Dari lima profil di atas, profil yang keempat yakni kualitas penduduk yang rendah, menjadi point penting sekaitan dengan kebijakan kualitas penduduk. Dalam UU No. 52 Tahun 2009, dijelaskan kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Kualitas penduduk menjadi isu penting, sekaitan dengan kebijakan *people center*, dimana penduduk menjadi sasaran baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan. Atas dasar kebijakan tersebut, Provinsi Sumatera Utara tengah berbenah dan melaksanakan arahan RPJPN “Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas”, yang meliputi: (1) Meningkatkan pembangunan manusia dan kesetaraan gender; (2) Mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang yang ditandai angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1 atau angka kelahiran total (TFR) 2,1; (3) Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas; (4) Penyediaan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya; (5) Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat; (6) Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat; (7) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan anak; dan (8) Meningkatkan pembangunan karakter

kebangsaan di kalangan pemuda dan perannya di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik.

## PENUTUP

Disadari, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bukanlah hal yang mudah. Banyak variabel berkaitan dengan kualitas penduduk yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Provinsi Sumatera Utara, diantaranya: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Untuk itu, peningkatan kualitas penduduk di Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan meliputi bidang: pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Ini berarti, kebijakan berwawasan kependudukan harus segera terumuskan dan menjadi arahan bagi tiga bidang pembangunan tersebut, secara komprehensif dan sinergis dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) Sumatera Utara yang berkualitas dan memiliki daya saing global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, A., & Hidayat, F. (2010). Dinamika Penduduk Dan Kebutuhanair. *JURNAL GEOGRAFI*, 2(2), 49-70.
- Delors, Jacques. 1996. *Learning: The Treasure Within*. Paris: UNESCO.
- Doornekamp, B.G. 1995. *Technology in Dutch Primary Education*. National Institut for Currriculum Development. The Netherlands.
- Effendi, S. (2013). *Pemerintah Demokratis-Developmentalis untuk Realisasikan Bonus Demografi*. (Makalah Seminar Internasional). Jakarta: BKKBN.

- Jalal, F. (2013). *Mengoptimalkan Manfaat Bonus Demografi Untuk Kemajuan Bangsa dan Kesejahteraan Penduduk*. (Makalah Seminar Internasional). Jakarta: BKKBN.
- Harefa, meilinda Suriani. (2012). *Meningkatkan Kualitas Manusia Dalam Praktek Lapangan Analisis Vegetasi dan Kemampuan E-Learning Melalui Problem Based Instruction (PBI)*. JURNAL GEOGRAFI. 4 (2) , 37-56.
- Hasan, Said Hamid. 1996. *Memacu Keunggulan Bangsa Melalui Sekolah Unggul*. (Artikel). Bandung: Mimbar Pendidikan University Press IKIP Bandung.
- Mas' oed, M dan Arfani, R.N. (1992). *Isyu-isyu Global Masa Kini*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM.
- Meadows, D.H., et.al. (1972). *The Limits to Growth*. New York: A Potomac Associates Book.
- Manullang. Marihot 2006. *Reformasi Pendidikan*, 16 Mei. tersedia di [http://www.hariansib.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=4823&Itemid=37](http://www.hariansib.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4823&Itemid=37) [29-05-2006].
- Nafi, M. 2004. *Indonesia Perlu Siap Hadapi Globalisasi Ketiga.*, 13 Desember. Tersedia di <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/04/12/brk,20050412-28,id.html> (12-04-2006).
- Salim, E. (2013). *Tantangan Pembangunan Bangsa*. (Makalah Seminar Internasional). Jakarta: BKKBN.
- Sumaatmadja, N.(2008). *Studi Geografi*. Bandung: Alumni.
- Suyanto. 2001. *Tantangan Pendidikan Hadapi Globalisasi*. Kompas. 16 Mei. Tersedia di <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0105/16/opini/tant04.htm> [01-06-2006].
- Suyanto. 2000. *Masalah Pendidikan Menghadapi Tantangan Globalisasi*. Tersedia di <http://Www.Bogor.Net/Idkf/Idkf/Aplikasi/Pendidikan/Masalah-Pendidikan-Menghadapi-tantangan-Globalisasi-03-2000.Rtf> [29-05-2006]
- Tillar, H. 1997. *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Globalisasi*. (Makalah). Jakarta: Universitas Indonesia.
- UNESCO. 1996. *Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century*.
- UNESCO dan APNIEVE. 2000. *Belajar Untuk Hidup Bersama Dalam Damai dan Harmoni*. Kantor Prinsipal UNESCO untuk Kawasan Asia-Pasifik, Bangkok & Universitas Pendidikan Indonesia.